

## **BAB V**

### **MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA YANG MENGEDEPANKAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL**

Desa memiliki segala potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas wisata dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Potensi yang bisa menjadi komoditas pariwisata bisa bermacam-macam dari segala aspek seperti keindahan alam hasil bumi, kekayaan flora dan fauna, sosio kultural, masyarakat, tradisi dan hal-hal yang bersifat unik yang tidak dimiliki daerah lain.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan.

Nilai utama dari pedesaan yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata adalah kualitas, keorisinilan, keunikan, khas daerah, dan kebanggaan daerah.<sup>1</sup> Nilai tersebut dapat dilihat dari gaya hidup masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perilaku, keramahan dan kesungguhan penduduk, adanya warisan budaya, pertanian, dan kekayaan alam yang indah nan asri.

Desa wisata sebagai pariwisata yang berkelanjutan, dalam pengembangannya penting memperhatikan daya dukung dan kerentanan lingkungan terhadap

---

<sup>1</sup> Sastrayudha, *Hand Out* ....., hal. 4

jumlah wisatawan yang berkunjung, serta partisipasi dan timbal balik yang dapat dinikmati masyarakat lokal serta dampak budaya dan ekonomi yang ditimbulkannya. Pengelolaan desa wisata yang didasarkan pada partisipasi masyarakat desa setempat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat meningkatkan pemerataan hasil dan kesejahteraan mereka. Namun, proses tersebut juga harus seimbang dalam mendukung kelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mewujudkan aturan budaya lokal. Dengan demikian, dalam proses perencanaan permodelan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi atau keterlibatan masyarakat lokal tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat lokal merupakan orang pertama yang mengetahui tentang kondisi daerahnya dari pada orang yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan baik dalam perencanaan, implementasi, hingga pengawasan program pengembangan desa wisata.

Dengan pengembangan pariwisata desa, harapan masyarakat kedepannya ialah tiada lain untuk mewujudkan sikap rasa memiliki pada diri masyarakat lokal sendiri, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan daya tarik wisata, serta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktifitas pariwisata yang berada di daerahnya. Nilai penting pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat adalah: mendorong tenaga kerja setempat seperti pemandu wisata,

karyawan wisata, rumah makan, pengrajin, seni pertunjukan, dan sebagainya, serta keunikan lingkungan alam yang dimilikinya.

Seorang ahli ekonomi kerakyatan, Mubyarto mengatakan bahwa pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.<sup>2</sup> Hal ini, sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu seperti seorang ahli pekerjaan sosial, Sulaiman, mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau diluar lingkungan masyarakat atau dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.<sup>3</sup>

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam sesuatu hal yang harus dikerjakan. Keterlibatan tersebut bisa berupa kontribusi dalam sebuah kegiatan serta dapat bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.

Sunaryo mengungkapkan bahwa dalam pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemerdayaan masyarakat menjadi isu

---

<sup>2</sup> Mubyarto dalam Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan ....*, hal. 110

<sup>3</sup> Sulaiman dalam Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan ....*, hal. 110

strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Strategi tersebut biasa dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat.<sup>4</sup> CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide dalam kegiatan pembangunan pariwisata dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat pula.

Pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata.<sup>5</sup> Model pembangunan berbasis masyarakat tersebut menekankan pada peningkatan keikutsertaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat lokal sebagai tuan rumah yang mengetahui seluk beluk kondisi wilayah dan kebudayaan setempat.

*community based tourism* (CBT) merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal dimana masyarakat lokal turut andil dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian. Sedangkan menurut Baskoro, *BRA community based tourism* (CBT) merupakan konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka

---

<sup>4</sup> Noor Rochman, *Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Equilibria Vo; 1, No. 1, 2016

<sup>5</sup> Ade & Risna, *Pengembangan Desa ....*, hal 8

miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, dan gaya hidup. Patin dan Francis (2005) juga mendefinisikan CBT (*community based tourism*) sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (*tool*) untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam dan sumber daya budaya komunitas.<sup>6</sup>

Pariwisata berbasis komunitas (CBT) memiliki peluang yang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu desa wisata juga dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha atau pelaku industri, yang dapat menimbulkan sosial-kultural yang minimal, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengembangan desa wisata, pembangunan pariwisata berkelanjutan sering dikaitkan dengan pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif yang berbasis komunitas memungkinkan masyarakat setempat untuk mempertemukan lingkungan alam dan budayanya dengan wisatawan. Masyarakat akan menyadari tentang nilai komersial terhadap warisan alam dan budaya yang dimilikinya yang dapat menimbulkan pemasukan ekonomi melalui pariwisata, hal ini akan mendorong masyarakat lokal untuk mengelola dan melestarikan lingkungan alam dan budayanya.

Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan konsep pariwisata berbasis komunitas adalah dengan merencanakan wisata pedesaan, artinya desa-desa

---

<sup>6</sup> Baskoro dalam Noor Rochman, *Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Equilibria Vo; 1, No. 1, 2016

yang memiliki potensi yang dapat dipromosikan untuk dikunjungi wisatawan dengan berbagai aktivitas keasliannya, seperti:

Desa wisata Danau Ranau Lumbok Lampung Barat, Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, Danau Ranau ini sangat potensial dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan di kawasan wisata danau ranau ini adalah dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) diantaranya melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, mengedukasi masyarakat terkait cara berinteraksi dengan wisatawan, meningkatkan kualitas pengorganisasian masyarakat sadar wisata, memberi peluang masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di kawasan Danau Ranau, membentuk organisasi masyarakat budaya di kawasan wisata, pengembangan kegiatan wisata alam, budaya serta buatan, dan meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung, bekerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat dalam pemanduan wisata.<sup>7</sup> Dalam pengembangan desa wisata Danau Ranau ditemukan model partisipasi masyarakat yaitu model forum warga sebagai bentuk ikutserta masyarakat dalam proses pembangunan.

Desa wisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka memiliki sumber daya alam yang potensial dan menarik untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata seperti kawasan pantai, sumber air panas, peninggalan sejarah serta kawasan gunung dan perbukitan. Model pengembangan pariwisata yang

---

<sup>7</sup> Dwi Bayu Prasetya, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Lampung Barat*, Jurnal Plano Madani, Vol. 6, No. 1, 2017

diusulkan dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan pariwisata di pantai rambah dan pantai rebo pada dasarnya merupakan potret upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Adapun model pengembangan di kawasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahapan awal, tahapan pertengahan, dan tahapan lanjutan. Dari ketiga tahapan tersebut terdapat pergeseran strategi, dari strategi direktif menuju ke strategi non direktif. Pendekatan direktif merupakan pembentukan budaya pariwisata di masyarakat. Sedangkan pendekatan non-direktif merujuk pada budaya pariwisata yang telah tertanam dalam aktifitas kehidupan masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di sekitarnya. Kedua pendekatan tersebut menekankan pada perlibatan penuh kepada masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata.<sup>8</sup> Dalam pengembangan Keterlibatan masyarakat di Kabupaten Bangka masih pasif. Hal ini Kabupaten Bangka memerlukan dorongan pemerintah untuk mengajak dan melibatkan masyarakat setempat untuk mengeloa dan mengembangkan desa wisata.

Desa wisata Linggarjati, dalam pengembangan desa wisata ini belum berpihak pada masyarakat, dalam pengelolaannya peran pemerintah dan pihak luar masih dominan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengambil manfaat dari pengembangan desa wisata ini, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, tahap

---

<sup>8</sup> Binahati Rusyidi, dan Muhammad Fedryansah, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No. 3, 2018

perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi<sup>9</sup> Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa ini masih kurang aktif, masyarakat masih belum menjadi subjek utama dalam pembangunan melainkan masih menjadi objek dalam pembangunan. Dalam hal ini masyarakat hanya menjalankan apa yang di pogramkan oleh pemerintah.

Desa wisata di Yogyakarta, model pengembangan pariwisata berbasis komunitas pada desa nelayan di kawasan Pantai Selatan khususnya di Pantai Baru ini baru dapat diterapkan dalam pola kemitraan antar pemangku kepentingan atau stakeholder yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga stakeholder holder tersebut saling bersinergi tanpa meminggirkan tanpa kepentingan satu pihak namun memprioritaskan kepentingan bersama. Pola kemitraan tersebut berbasis pada prinsip 3L dalam pariwisata berbasis komunitas yaitu local resource, local benefit, dan local organize. Seluruh sumberdaya yang dimiliki berasal dari potensi alam dan budaya, memberikan manfaat secara adil pada masyarakat lokal, dan dikelola oleh komunitas lokal.<sup>10</sup> Model partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam desa wisata di Yogyakarta ini adalah model kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengembangan desa wisata, model pengamatan dan penyampaian masukan, dan pengaduan terhadap pemerintah dan swasta.

Setiap desa wisata yang dikembangkan itu berbeda-beda, seperti contoh di atas tergantung bagaimana cara pengelolaannya, konsep yang akan

---

<sup>9</sup> Ade & Risna, *Pengembangan Desa ....*, hal. 8

<sup>10</sup> Aditha Agung Prakoso & Vina Dini Pravita, *Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Pada Desa Nelayan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Seminar Nasional & Call For Paper, 2018

dikembangkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam menentukan hal tersebut pengembangan desa wisata harus mencerminkan suasana pedesaan, mengandalkan potensi pedesaan yang ada mencakup aspek budaya, sejarah dan alam. Seperti yang dijelaskan pada BAB II bahwa menentukan atau memudahkan kita dalam melihat potensi desa dibagi dalam 4 macam, diantaranya adalah : apa yang bisa kita lihat (*something to see*), apa yang bisa kita lakukan (*something to do*), apa yang bisa kita dimakan (*something to eat*), dan apa yang bisa kita beli (*something to buy*).

Dengan cara di atas, perlu masyarakat desa lakukan dalam menentukan model pengembangan desa wisata karena dalam merumuskan model pengembangan desa wisata juga memerlukan perencanaan yang matang agar dapat menjadi salah satu objek wisata yang menjadi sebuah kenangan atau dapat membuat kesan bagi para wisatawan.

Kesuksesan mengembangkan desa wisata tergantung pada partisipasi masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam membangun, memiliki, dan mengelola langsung fasilitas wisata serta dalam pelayanannya. dengan adanya CBT diharapkan masyarakat dapat menikmati keuntungan ekonominya dan mencegah dampak yang timbul terhadap lingkungan. Hal tersebut juga dapat terwujud apabila ada hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah dan pelaku pariwisata.

Dengan demikian masyarakat akan merasakan pemerataan hasil dari pariwisata dan akan dapat menggugah masyarakat untuk membuka usaha pariwisata, sehingga pendapatan meningkat dan berkurangnya kecemburuan

sosial dalam masyarakat. Adapun tolak ukur pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan.